BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintah

2.1.1.1 Pengertian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP). PSAP merupakan SAP yang diberi nomor, judul, isi, dan tanggal berlaku. Berikut ini beberapa pengertian standar akuntansi pemerintah menurut para ahli, Dadang Suwanda (2015:8) menyatakan bahwa:

> "Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah".

Selanjutnya menurut Indra Bastian (2010:138) menjelaskan pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut :

> "Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia".

Hal senada dikatakan Baldric Siregar (2015:72) bahwa:

> "Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan dalam menyusun penyajian laporan keuangan pemerintah.

2.1.1.2 Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Baldric Siregar (2015:79), Abdul Hafiz Tanjung (2015:82), Erlina (2015:11) dan PP No 71 Tahun 2010, pernyataan standar akuntansi pemerintah sebagai berikut :

a) PSAP 1 Penyajian Laporan Keuangan
b) PSAP 2 Laporan Realisasi Anggaran
c) PSAP 3 Laporan Arus Kas
d) PSAP 4 Catatan Atas Laporan Keuangan
e) PSAP 5 Akuntansi Persediaan
f) PSAP 6 Akuntansi Investasi
g) PSAP 7 Akuntansi Aset Tetap
h) PSAP 8 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
i) PSAP 9 Akuntansi Kewajiban
j) PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan
k) PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi

Adapun penjelasan pernyataan dari standar akuntansi pemerintahan sebagai berikut :

a) PSAP 1 Penyajian Laporan Keuangan

Pada PSAP 1 diuraikan tujuan laporan keuangan, tanggung jawab pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta struktur dan isi laporan keuangan. Komponen Laporan Keuangan ada 7 yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Neraca
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

b) PSAP 2 Laporan Realisasi Anggaran

PSAP 2 mengatur tentang penyajian laporan realisasi anggaran. Isi PSAP 2 ini meliputi struktur dan isi laporan realisasi anggaran serta akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/defisit LRA, akuntansi pembiayaan, akuntansi penerimaan pembiayaan, akuntansi pengeluaran pembiayaaan, akuntansi pembiayaan neto, dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

c) PSAP 3 Laporan Arus Kas

PSAP 3 ini mengatur tentang penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan kas awal periode, sumber dan

penggunaan kas, serta saldo kas akhir periode. Arus kas terbagi menjadi 4 bagian yaitu :

1) Arus Kas Aktivitas Operasi
2) Arus Kas Aktivitas Investasi
3) Arus Kas Aktivitas Pendanaan
4) Arus Kas Aktivitas Transitoris

d) PSAP 4 Catatan Atas Laporan Keuangan

PSAP ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Isi PSAP ini meliputi ketentuan umu serta struktur dan isi informasi dalam catatan atas laporan keuangan.

e) PSAP 5 Akuntansi Persediaan

PSAP 5 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap persediaan. Perlakuan akuntansi yang dimaksud meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

f) PSAP 6 Akuntansi Investasi

PSAP 6 mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi. Isi PSAP 6 meliputi klasifikasi investasi dan pengakuan investasi. Pengertian investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi dibagi menjadi 2

yaitu ada investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Pengakuan Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang.

g) PSAP 7 Akuntansi Aset Tetap

PSAP 7 mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap seperti klasifikasi aset tetap yang mengklasifikasikan aset pemerintahan yaitu tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan. Selanjutnya ada pengakuan aset tetap yang diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal, kriterianya seperti berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari setahun, harga perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, dan diperole dengan maksud untuk digunakan.

h) PSAP 8 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Isi PSAP 8 adalah konstruksi dalam pengerjaan, pengakuan konstruksi dalam pengerjaan, dan pengukuran konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Selanjutnya Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan yang diakui ada 3 yaitu:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Lalu Pengukuran konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

i) PSAP 9 Akuntansi Kewajiban

Isi PSAP 9 meliputi klasifikasi kewajiban, pengakuan kewajiban, dan pengukuran kewajiban. Klasifikasi kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan. Selanjutnya pengakuan kewajiban yaitu kewajiban dapat diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Lalu pengukuran kewajiban adalah kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal kewajiban merupakan pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

j) PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan

Isi PSAP 10 meliputi tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Koreksi kesalahan adalah penyajian akun yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Selanjutnya Perubahan kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, perubahan bisa terjadi apabila ada perubahan dari perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Lalu ada Perubahan estimasi akuntansi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi mendasari estimasi tersebut atau karena terdapat informasi baru atau perkembangan lainnya. Dan yang terakhir ada Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program atau kegiatan lainnya.

k) PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi

Isi dari PSAP 11 mengenai penyajian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan yang disusun entitas akuntansi meliputi:

1) Laporan Realisasi Anggaran
2) Laporan Operasional
3) Laporan Perubahan Ekuitas
4) Neraca
5) Catatan Atas Laporan Keuangan

2.1.2 Kualitas Sumber Daya Manusia

2.1.2.1 Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia

Berikut beberapa pengertian dari kualitas yaitu menurut Imam Mulyana (2010 : 96) kualitas adalah:

"Sebagai kesesuaian dengan standar diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.

Selanjutnya dikatan menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra (2011) dalam jurnalnya dikatakan pengertian kualitas adalah:

> “Dirinci atau sering kali dianggap sebagai ukuran relative kesempurnaan atau ukuran seberapa besar tingkat kesesuaian antara sebuah produk atau jasa”.

Kemudian Setelah itu dikatakan Hardiansyah (2011) dalam jurnalnya pengertian kualitas yaitu:

> “Kesusaian dengan persyaratan, kecocokan untuk pemakaian, perbaikan berkelanjutan, bebas dari kerusakan, pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat, melakukan segala sesuatu secara benar, sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan”.

Berdasarkan pengertian kualitas di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah ukuran relative kesempurnaan atau orang yang menilainya atau merinci sehingga produk atau barang yang dihasilkan mendapatkan hasil yang bagus.

Di bawah ini beberapa pengertian tentang sumber daya manusia adalah Menurut Wirawan (2015:18) menjelaskan bahwa:

> “Sumber daya Manusia adalah orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh atau tenaga kerja yang bekerja untuk organisasi”.

Hal senada disampaikan oleh Eddy Soeryanto Soegoto (2014:306) memberi pengertian yaitu:

> ”Sumber Daya Manusia adalah individu-individu dalam organisasi yang memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan organisasi”.

Kemudian dipaparkan oleh M. Dawam Rahardjo (2010:18) menjelaskan pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia yaitu:

> “Kualitas sumber daya manusia itu hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya pengalaman atau kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimilikinya”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia adalah individu-individu atau yang disebut sebagai tenaga kerja, karyawan, potensi manusiawi yang bekerja untuk organisasi.

2.1.2.2 Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia

Berbicara tentang masalah kualitas sumber daya manusia tentunya ada tolak ukur yang dapat kita jadikan patokan atau perbandingan agar kita bisa mengetahui dan menentukan manusia yang berkualitas. Dengan adanya batasan dan tolak ukur ini, dapat dijadikan landasan dalam menentukan kualitas pribadi seseorang.

Pengertian yang dikemukakan oleh Selo Sumarjan (2009) yang dikutip oleh Sudarwan Danim (2009) bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kita inginkan dibedah atas dasar kualitas fisik (kesehatan, kekuatan jasmani, keterampilan dan ketahanan) dan kualitas non fisik (kemandirian, ketekunan, kejujuran dan akhlak).

Menurut M. Dawan Rahardjo (2010:18) beliau mengatakan bahwa indikator dari kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

1) Kualitas Intelektual (pengetahuan dan keterampilan) meliputi :
   a) Memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan tuntunan industrialisasi.
   b) Memiliki pengetahuan bahasa, meliputi bahasa nasional, bahasa daerah dan sekurang-kurangnya satu bahasa asing.
2) Pendidikan
   a) Memiliki kemampuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
   b) Memiliki tingkat ragam dan kualitas pendidikan serta keterampilan yang relevan dengan memperhatikan dinamika lapangan kerja baik yang di tingkat local, nasional maupun internasional.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berikut beberapa pengertian tentang laporan keuangan pemerintahan daerah yaitu Menurut Erlina (2015:25) mengungkapkan :

> "Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ukuran orang yang menilai atau merinci dari suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi yang menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan uang dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan".

Hal senada dipaparkan Baldric (2015:12) pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

> "Adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut".

2.1.3.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat indikator berikut ini menurut Erlina (2015:30), dan Baldric Siregar (2015:77) merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

1. Relevan

   Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna membantu mereka

mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, dan memprediksi masa depan. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan :

a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value).* Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspentasi mereka di masa lalu.
b) Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
c) Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencangkup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
d) Manfaat prediktif (*predictive value).* Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan dapat disajikan.

b) Dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralisasi. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan, yaitu laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode dan antar unit pemerintahan.

4. Dapat dipahami

   Informasi yang disajikan oleh laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut Ahyani (2007:60) mengatakan bahwa:

> “Penerapan SAP berbasis akrual memberikan hasil yang lebih baik dan memberikan keuntungan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah”.

Selanjutnya dikatakan pula oleh Mardiasmo (2009:247) juga menyatakan bahwa:

> ”Akuntansi berbasis akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi berbasis kas karena dianggap laporan keuangan yang disajikan lebih percaya”.

Berdasarkan pemaparan diatas tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diambil kesimpulam bahwa pernerapan basis akuntansi akrual sangat berpengaruh dan hasilnya lebih terpercaya pada penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam penelitian sebelumnya dikatakan Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013) bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal senada juga dikatakan dalam penelitan sebelumnya menurut M. Ali Fikri dan kawan-kawan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

2.2.2 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

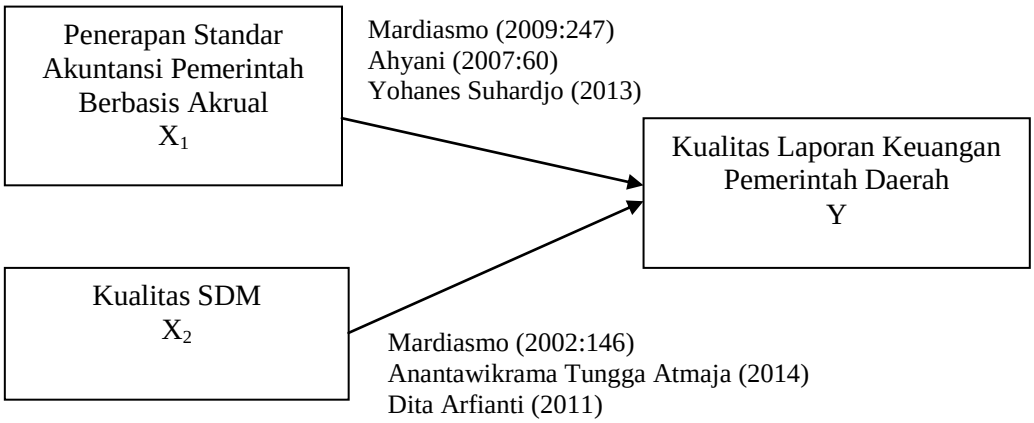
Dalam pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut Mardiasmo (2002:146) mengungkapkan bahwa:

> ”Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa berkualitas dan baik”.

Berdasarkan pemaparan diatas tentang pengeruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dapat berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan yang baik dan bisa tepat waktu.

Selanjutnya hasil penelitian sebelumnya menunjukkan menurut Anantawikrama Tungga Atmaja (2014) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap nilai laporan keuangan.

Kemudian hal senada dikatakan oleh Dita Arfianti (2011) dalam penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

No	Nama Penelitian / Tahun	Jurnal	Kesimpulan Penelitian
1	M. Ali Fikri, Biana Adha Inapty, dan RR. Sri Pancawati Martiningsih / 2015	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Universitas Mataram NTB)	Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
2	Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerinta Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	a) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.; b) Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.; dan
3	Rukmi Juwita (2013)	Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.(Volume 12, No. 2, Desember 2013, Hal. 201–214 ISSN 1411-514X Politeknik Pos Indonesia	Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dapat bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
4	Ni Made Sudiarianti, I Gusti Ketut Agung Ulupui, I G.A Budiarsih (2015)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif terhadap laporan keuangan.
5	Dita Arfianti (2011)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sumber Daya Manusia, SPIP (sistem pengendalian intern pemerintah), teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.
6	Made Ayu Darmayani, Nyoman Trisna Herawati, Anantawikrama Tungga Atmaja (2014)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Laporan Keuangan Pada Bagian Keuangan SETDA Kabupaten Buleleng (Jurnal ISSN 2302-0164)	Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap nilai laporan keuangan.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

2.3 Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti kurang dan thesa yang artinya pendapat. Oleh sebab itu secara etimologis hipotesis diartikan sebagai pernyataan yang belum mendapatkan thesa.

Menurut Sugiyono (2013;99), menjelaskan bahwa:

> ”Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”.

Dikatakan sementara, karena jawaban yang baru diberikan berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan penjelasan di atas dan paradigma penelitian di atas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H_2: Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.